

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2021**

SEKRETARIAT DPRD

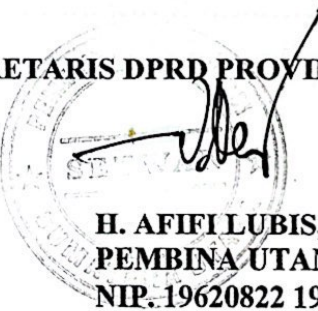
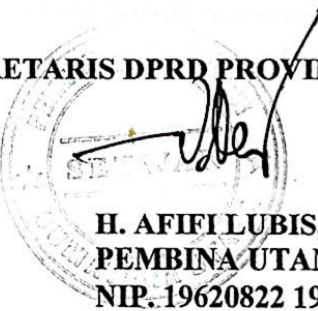
PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga menimbulkan perubahan struktur anggaran. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilakukan terhadap seluruh kegiatan, memuat nama – nama program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengalami perubahan baik itu penambahan kegiatan, pengurangan kegiatan, juga penambahan dan pengurangan pagu anggaran. Seluruh perubahan pada Renja Sekretariat DPRD diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan dalam memberikan fasilitasi/pelayanan pada masa yang akan datang juga digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 ..	5
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	11
BAB IV. PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD ini mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur anggaran. Disamping itu pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan juga ditemukan berbagai kondisi, diantaranya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan penambahan atau pengurangan kegiatan, serta adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021.

Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menjawab berbagai isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan Good Governance untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan tujuan :

- a. Terwujudnya fasilitas administrasi yang optimal kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya.
- c. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan.
- d. Peningkatan kinerja ASN Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang maju dan bermartabat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dianggarkan dana sebesar Rp. 264.999.408.308,-.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Secara rinci evaluasi pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1 ; Format I.G berikut ini.

Tabel 1 : Format I.G

EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021	Realisasi Kinerja			Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=9/4
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	300%		100%		50%		16,67%
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Gaji dan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	36 bulan		12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	16,67%
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	0	0%	0	0
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembayaran PBB Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun		1 Tahun	0	0	0	0
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		300%				50%		16,67%
4.02.01.1.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Isi Card ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pengamanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pakan Dinas Harian Coddit Kaki untuk Selawan, Pakan Olahraga Untuk ASN Sekretariat DPRD Provinsi, Sepatu Olah Raga untuk ASN Sekretariat DPRD Provinsi	330 pasang/tahun		110 pasang/tahun	110 pasang/tahun	100%	110 pasang/tahun	33,33%
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya								

4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan TK.III dan IV	16 orang		8 orang	0	0	0	0
4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	36 bulan		12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	16,67%
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		300%		100%		12,26%		4,19%
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	300%		100%	26,99%	27%	26,99%	9,00%
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	300%		100%	0	0%	0	0
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan	300%		100%	4,14%	4%	4,14%	1,38%
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang disediakan	300%		100%	10,46%	10,46%	10,46%	3,49%
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang disediakan	300%		100%	7,15%	7,15%	7,15%	2,38%
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya perjanjian dinas dalam daerah dan Luar Daerah ASN DPRD Provsu	337 orang		121 orang	30 orang	24,79%	30 orang	8,90%

4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		300%	100%	35%		11,81%
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tebayanya tagihan telepon, air, listrik dan TV berlangganan/TV Kabel di Kantor DPRD Provinsi dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi	36 Bulan	12 Bulan	50%	6 bulan	16,67%
4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Persentase jasa perawatan dan peningkatan kantor	300%	100%	23,26%	23,26%	7,75%
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor DPRD Provinsi	300%	100%	33,00%	33,00%	11,00%
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		300%	100%	24,63%		8,21%
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	189 unit	63 unit	49,21%	31 unit	16,40%
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	300%	100%	15,40%	15,40%	5,13%
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi peralatan dan peningkatan kantor serta pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya kantor DPRD SU	300%	100%	9,28%	9,28%	3,09%

1.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			300%		100%		21,67%		7,22%
1.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD SU	36 bulan		12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	16,67%	
1.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakain Dinas dan Attribut DPRD	Tersedianya Pakain dinas dan attribut Pimpinan dan Anggota DPRD SU	300 orang/stel		100 orang/stel	0	0	0	0	
1.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD SU yang mendapatkan Medical Check Up	300 orang		100 orang	15 Orang	15%	15 Orang	5%	
1.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
1.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		300%		100%		8,34%		2,78%	
1.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah pembahasan Rancangan Perda	36 Perda		12 Perda	2 Perda	16,67%	2 Perda	5,56%	
1.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Penunjang-Undangan	Persentase Kajian Masalah Akademik	300%		100%	0	0%	0	0	
1.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		300%		100%		36,25%		12,08%	
1.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD SU yang mengikuti kegiatan Bimtek	300 orang		100 orang	45 orang	45%	45 orang	15%	

4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Radio(TakShow/Dabq) Publikasi TV Swasta Lokal Time Signal menjelang azan Magrib Ramadhan	72 Paket	24 Paket	0	0	0	0
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kebmpok Pazar dan Tm Ahl	Jumlah kebmpok palatrim ahli DPRDSU, jumlah tenaga ahli fraksi-fraksi DPRDSU	141 orang	47 orang	47 orang	100%	47 orang	33,33%
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tertulisannya rapat kerja DPRDSU	3 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	0
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah bugis pelaksanaan kunjungan kerja ke dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD SU beserta staf pendamping.	300%	100%	6 Bulan	50%	6 Bulan	16,67%
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan kerja DPRD dalam rangka LPJP Provinsi	36 Dapil	12 Dapil	12 Dapil	100%	12 Dapil	33,33%
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Tertulisannya kegiatan reses pimpinan dan Anggota DPRDSU	9 Kali	3 Kali	2 Kali	66,67%	2 Kali	22,22%
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah		100%	100%		25%		25%
4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah bahan bacaan koran/media cetak	57,144 Eksemplar	57,144 Eksemplar	14,286 Eksemplar	25%	14,286 Eksemplar	25%
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi kunjungan kerja luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD SU beserta staf pendamping.	300%	100%		25%		8,34%
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota dprdsu beserta staf pendamping yang melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri	36 Bulan 135 orang	12 Bulan 45 orang	6 Bulan	50%	6 Bulan	16,67%
					0	0	0	0

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah melihat capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ada beberapa program/kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran. Perubahan pagu anggaran dari penetapan Renja untuk masing – masing program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan. Perubahan pagu anggaran pada program ini mencakup penambahan dan pengurangan anggaran pada sub kegiatan. Beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2021 dengan alasan keterbatasan waktu, juga penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan yang disesuaikan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/KP/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Provsu Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan. Perubahan pagu anggaran pada program ini mencakup penambahan dan pengurangan anggaran pada sub kegiatan. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Pandemi, Pengurangan volume Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD-SU, dan Penambahan Pagu pada Sub Kegiatan Reses.

Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 tertuang dalam Tabel 2 : Format I.H berikut ini.

Tabel 2. Format I.H

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih	
4.02.01.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Provinsi Sumatera Utara	100%	-	251.963.844.888	292.513.085.028	40.560.040.738	200.582.583.724
4.02.01.1.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	204.999.800
4.02.01.1.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah RKA, DPA, dan DPPA	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	150.000.000
4.02.01.1.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Sekretariat DPRD Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	64.999.960
4.02.01.1.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	79.999.850
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Gaj Dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumatera Utara	100%	-	17.834.092.000	14.772.436.690	(3.061.655.310)	18.899.999.850
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Penyusunan Gaj Dan Tunjangan Gaj dan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	-	17.834.092.000	14.772.436.690	(3.061.655.310)	18.800.000.000
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Sekretariat DPRD	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	49.999.950
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan BPK	Jumlah dokumen bahan dan tanggapan pemeriksaan BPK Inspektorat dan Ipin	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	49.999.900
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan PBB Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	100%	-	25.000.000	25.000.000	-	-
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun	-	25.000.000	25.000.000	-	-

4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%		57.109.830.000	103.848.985.000	46.739.155.000	100%	59.365.830.000
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Baserta Akibat Kelengkapannya	IdCard ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pengamanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pakaian Dinas Harian Colat Kaki untuk Sekwan, Pakaian Olahraga Untuk ASN Sekretariat DPRD Provsu, Sepatu Olah Raga untuk ASN Sekretariat DPRD Provsu.	Provinsi Sumatera Utara	110 pasang/stel		172.200.000	171.100.000	(1.100.000)	110 pasang/stel	259.990.000
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan TK III dan IV	Provinsi Sumatera Utara	8 orang		165.630.000	87.865.000	(77.745.000)	50 orang	169.840.000
4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tetapannya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Provinsi Sumatera Utara	12 bulan		56.772.000.000	103.590.000.000	46.818.000.000	12 bulan	58.896.000.000
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%		19.354.186.086	15.078.995.634	(4.275.190.452)	100%	8.827.129.320
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%		325.849.850	325.849.850	-	100%	399.997.260
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%		11.325.948.936	6.813.689.324	(4.512.259.612)		
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perentase peralatan rumah tangga yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%		407.350.500	407.350.500	-	100%	625.037.500
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perentase bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%		5.130.535.300	5.149.561.310	19.026.010	100%	5.478.997.560

4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%		1.548.447.500	1.560.950.650	12.503.150	100%	997.560.000
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan penunjang - undangan yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara					-	150 buku	75.000.000
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan Luar Daerah ASN DPRD Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	121 orang		616.044.000	821.584.000	205.540.000	108 orang	1.250.536.000
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Peralatan Kantor	Provinsi Sumatera Utara					-	100%	1.899.991.340
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan mebel	Provinsi Sumatera Utara					-	100%	399.991.250
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara					-	50 set	1.500.000.090
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%		17.259.027.444	18.486.001.444	1.216.974.000	100%	18.174.954.560
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Banda Pos dan Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Utara	12 Bulan				-	1675 buah / 500 surat	25.000.000
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya tagihan telepon, air, listrik dan TV belangan/TV Kabel di Kantor DPRD Provinsi dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	12 Bulan		3.642.125.000	4.067.139.000	425.014.000	12 bulan	3.749.955.000
4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	Persentase jasa perbaikan dan penggantian kantor	Provinsi Sumatera Utara	100%		554.019.000	613.789.000	59.770.000	0	-
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor DPRD Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	100%		13.072.883.444	13.805.073.444	732.190.000	100%	14.399.999.560

4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumatera Utara	100%		13.669.988.748	13.723.618.748	53.630.000	100%	6.121.414.854
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sumatera Utara	63 unit		151.000.000	151.000.000	-	76 unit	175.000.000
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumatera Utara	100%		1.286.938.900	1.286.938.900	-	100%	1.394.165.096
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Sumatera Utara	100%		12.232.049.848	12.285.679.848	53.630.000	100%	4.552.249.758
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Provinsi Sumatera Utara	100%		126.001.520.610	126.578.648.110	(112.872.500)	100%	142.642.000.000
4.02.01.1.15.01	Penyediaan Anggaran Administrasi Keuangan DPRD	Provinsi Sumatera Utara	12 bulan		124.424.310.610	124.424.310.610	-	12 bulan	140.000.000.000
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Paksi Dinas dan Attribut DPRD	Provinsi Sumatera Utara	100 orang/staf		1.607.210.000	1.626.337.500	19.127.500	100 orang/staf	1.949.000.000
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Provinsi Sumatera Utara	100 orang		660.000.000	528.000.000	(132.000.000)	100 orang	693.000.000
4.02.01.1.15	Layanan Administrasi DPRD	Provinsi Sumatera Utara					-	100%	6.356.265.000
4.02.01.1.15.01	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Provinsi Sumatera Utara					-	100%	6.356.265.000

4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Provinsi Sumatera Utara			141.971.052.690	132.826.936.180	(9.144.116.500)		201.821.639.400
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Provinsi Sumatera Utara	100%		6.577.506.000	6.477.390.000	(100.116.000)	100%	8.262.746.700
4.02.02.1.01.02	Pertimbangan Rancangan Perda	Provinsi Sumatera Utara	12 Perda		5.598.202.000	5.498.096.000	(100.116.000)	100%	7.308.746.700
4.02.02.1.01.03	Peningkatan Kajian Perundang-undangan	Provinsi Sumatera Utara	100%		980.304.000	980.304.000	-	10 Kegiatan / 6 Paket	954.000.000
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Provinsi Sumatera Utara	100%		7.887.566.690	7.910.210.180	22.653.500	100%	9.263.924.700
4.02.02.1.04.02	Barang-barang Teknik DPRD	Provinsi Sumatera Utara	100 orang		864.402.000	864.402.000	-	100 orang	1.225.000.000
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Provinsi Sumatera Utara	24 Paket		342.040.000	417.430.000	75.390.000	1 Tahun	1.161.528.000
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Provinsi Sumatera Utara	47 orang		4.230.000.000	4.230.000.000	-	48 Orang	4.230.000.000
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Provinsi Sumatera Utara	1 Kegiatan		2.451.124.680	2.388.387.180	(62.737.500)	1 Kegiatan	2.647.396.700
4.02.02.1.05	Penyusunan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Provinsi Sumatera Utara	100%		69.540.815.000	83.305.855.000	13.764.840.000	100%	80.396.560.000
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Provinsi Sumatera Utara	12 Bulan		16.502.795.000	25.870.345.000	9.367.550.000	12 bulan	21.747.670.000
4.02.02.1.05.03	Publikasi dan Riset	Provinsi Sumatera Utara	3 Kali		53.038.020.000	57.435.510.000	4.397.290.000	3 Kali	58.948.860.000

4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%		338.496.000	286.496.000	(72.000.000)	100%	195.000.000
4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah bahan bacaan koran/media cetak	Provinsi Sumatera Utara	57.144 Eksemplar		338.496.000	286.496.000	(72.000.000)	20 Media	195.000.000
4.02.02.1.08	Facilitasi Tugas DPRD		Provinsi Sumatera Utara	100%		57.626.669.000	34.867.176.000	(22.759.493.000)	100%	103.703.408.000
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi kunjungan kerja luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD SU beserta Staf pendamping	Provinsi Sumatera Utara	12 Bulan		57.626.669.000	34.867.176.000	(22.759.493.000)	12 bulan	86.446.362.000
4.02.02.1.08.03	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tugas DPRD	Provinsi Sumatera Utara						100%	17.257.016.000
JUMLAH						393.924.697.568	425.340.621.806	31.415.924.238		462.404.223.124

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 disampaikan. Perubahan Rencana Kerja ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan aturan – aturan yang ditetapkan. Kiranya Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Medan,**2021****SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA****H. AFIF LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003**